

**Judul** : Ada dugaan mark up pesawat, Garuda dipersilakan suspen pihak lessor  
**Tanggal** : Kamis, 28 Oktober 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Ada Dugaan Mark Up Pesawat Garuda Dipersilakan Suspen Pihak Lessor

ANGGOTA Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta maskapai Garuda Indonesia melakukan *suspen* atau penundaan terhadap seluruh kewajiban ke pihak *lessor* atau penyedia pesawat. Hal ini jika terbukti ada *mark-up* terhadap harga sewa pesawat. Tindakan lessor ini dinilai menciderai prinsip *business ethic and law* sehingga menyebabkan kerugian pada Garuda.

“Hukum ditegakkan bagi para ‘penjahat kerah putih’ yang telah melakukan mark-up atas *leasing* pesawat sehingga menyebabkan kerugian Garuda. Ini harus dibongkar, sehingga ketahuan siapa yang menikmati adanya mark up itu,” tegas Evita dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Evita meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan mark up ini. Pengusutan itu harus dilakukan terhadap semua mantan direksi Garuda Indonesia yang harusnya ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung negara tersebut.

“Garuda Indonesia pantas melakukan renegosiasi ulang. Kalau perlu dengan ancaman untuk mensuspen seluruh kewajiban Garuda terhadap lessor yang terbukti melakukan mark up,” wanti politisi perempuan PDIP ini.

Mengenai solusi bagi penyehatan Garuda, Evita menegaskan, fraksinya pasti akan selalu mengingat faktor kesejarahan Garuda sebagai *flag carrier*. Juga membela kepentingan karyawan maskapai penerbangan ini. Solusi penyehatan Garuda dilakukan tanpa harus menanggung beban akibat tindakan mark-up leasing pesawat.

“Kita tegaskan membela karyawan, dan menindak para eksekutif Garuda yang telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kongkalikong dengan lessor tertentu,” ucapnya.

Evita kemudian berkaca pada kasus pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce pada periode 2004-2015 yang ditangani KPK. Kala itu, KPK menemukan adanya dugaan mendongkrak harga sewa pesawat di atas ketentuan yang sepatutnya. Sementara selisih harga tersebut masuk ke kantong pribadi.

KPK saat itu berpendapat, sebagai perusahaan milik negara, Garuda harusnya mencari harga termurah dari suatu produk. Namun, terdapat pihak yang ingin mendapat keuntungan sehingga membuat perusahaan justru membeli barang dengan harga yang sengaja dimahalkan. ■ KAL